



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **658106**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 51.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/300 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 13.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/130 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/320 m2 di BANDUNG, WARISAN Rp. 14.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/1000 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di BANDUNG, WARISAN Rp. 8.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 3.118.050.000**

1. MOTOR, HARLEY FATBOY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 882.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. MOBIL, VW VW POLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 256.050.000



4. MOBIL, BMW BMW 330I Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
1.200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.267.241.718

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.250.988.462

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000.000

Sub Total Rp. 68.186.280.180

III. HUTANG Rp. 13.019.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 55.167.280.180

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.